

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafiak.
- Ashofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boedi Harsono, . (2013). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M.Arba. (2017). *Hukum Agraria Indoesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komperehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Suted, A. (2014). *Peralihan Atas Tanah Dan Pendaftaraannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2013). *Metode Riset Kuantitatif Komunikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta : Raia Asa Sukses.

### Jurnal

- Adhaper. (2015). Tripologi sengketa Tanah dan Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 55.
- Arinda, A. (2016). Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Untuk Anak di Bawah Umur. *Repertorium*, 30.

Ismail, I. (2011). Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26.

Lamila, C. F. (2016). Pewarisan Hak Tanah Warisan. *Lex Privatum*, 95 .

Larasati, A. &. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah dengan perjanjian Jual beli menurut hukum pertanahan Indonesia. *Zaaken: Journal of civil and business law*, 130 .

Mulyadi, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis* , 156.

Runtuwene, N. (2014). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Tanpa Ha. *Lex Privatum*, 103.

### **Undang –undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria* Pasal 19

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang *Badan Pertanahan Nasional* Pasal 3

Keppres Nomor 34 Tahun 2003, Tentang *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*,

Keputusan Menteri Nomor Nomor 300/KMK/01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pasal 87 Pasal 91

KUHPerdata dan KUHAP

### **Internet**

<file:///C:/Users/Windows/Documents/tugas%20ulfa/paper%20dian/SKRIPSI/09-PERAN-KEMENTERIAN-ATRBPB-Sekjen-Kementerian-ATRBPB.pdf> di akses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 13:00